CASCADING

VISI

Pembangunan Gresik Maju yang berkelanjutan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat

MISI

Meningkatkan Sistem Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berorientasi pada Pelayanan yang Terbaik bagi Masyarakat.

TUJUAN

Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Digital Yang Adaptif dan Transparan

Indeks Pemerintah Digital

SASARAN

Meningkatnya digitalisasi Layanan	Meningkatnya implementasi persandian pada digitalisasi layanan	Meningkatnya kualitas pengelolaan data statistik	Meningkatnya kualitas pelayanan informasi dan dokumentasi
Persentase digitalisasi layanan	Persentase digitalisasi layanan yang menerapkan persandian	Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Statistik Sektoral dalam Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	Nilai keterbukaan informasi publik
			Persentase Pengaduan pelayanan Publik yang diselesaikan

PROGRAM

PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
Kapasitas bandwith jaringan intra pemerintah daerah	Indeks KAMI (keamanan informasi)	Indeks Pembangunan Statistik	Persentase keterpenuhan data dan/atau informasi publik yang ditentukan oleh komisi informasi (Self Assessment Questionnaire)	Persentase pengaduan layanan publik yang ditindaklanjuti
Persentase aplikasi yang dimanfaatkan Perangkat Daerah				
persentase pemenuhan kebutuhan server				

KEGIATAN

PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA	PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
Jumlah area publik dan perangkat daerah yang difasilitasi jaringan internet	Jumlah aplikasi yang difasilitasi pengembangannya menggunakan SDLC (Software Development Life Cycle)	Jumlah aplikasi yang ditempatkan di Pusat Komputasi dan Pusat Data	Jumlah Aplikasi yang diamankan	persentase data sektoral yang terintegrasi dalam satu data	Jumlah Informasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang dipublikasikan	Persentase pengaduan layanan publik yang difasilitasi
	Jumlah perangkat daerah yang difasilitasi dalam penyelenggaraan SPBE					
	Jumlah layanan SPBE yang dikelola melalui service desk					

SUB KEGIATAN

PENYELENGGARAAN JARINGAN INTRA PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA	PENYEDIAAN AKSES INTERNET	KOORDINASI PEMBANGUNAN DAN/ATAU PENGEMBANGAN APLIKASI KHUSUS YANG SESUAI DENGAN ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA SPBE PEMERINTAH DAERAH, SERTA PEMANFAATAN APLIKASI UMUM SPBE	PENYELENGGARAAN SISTEM PENGHUBUNG LAYANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA INTEROPABILITAS DATA DAN INTEGRASI LAYANAN	KOORDINASI PENYUSUNAN KEBIJAKAN TATA KELOLA SPBE MELIPUTI ARSITEKTUR, PETA RENCANA, PROSES BISNIS, SERTA PENYUSUNAN RENCANA DAN ANGGARAN SPBE PEMERINTAH DAERAH	KOORDINASI DAN FASILITASI PROMOSI LITERASI SPBE DAN/ATAU KOLABORASI PENYELENGGARAAN SPBE	KOORDINASI DAN FASILITASI PENYELENGGARAAN KABUPATEN ATAU KOTA CERDAS	KOORDINASI PELAKSANAAN MANAJEMEN SPBE	KOORDINASI PEMANFAATAN PUSAT DATA NASIONAL	PELAKSANAAN KEAMANAN INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH BERBASIS ELEKTRONIK DAN NON ELEKTRONIK	PENGELOLAAN SUMBER DAYA KEAMANAN INFORMASI DAN PERSANDIAN PEMERINTAH DAERAH BERDASARKAN ANALISIS KEBUTUHAN	PENYEDIAAN LAYANAN KEAMANAN INFORMASI DAN PERSANDIAN PEMERINTAH DAERAH	KOORDINASI DAN KOLABORASI DALAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	PELAKSANAAN PROSES BISNIS STATISTIK SEKTORAL SESUAI STANDAR	PENGINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN STATISTIK SEKTORAL	PENINGKATAN KUALITAS STATISTIK SEKTORAL	RELASI MEDIA	KEMITRAAN KOMUNIKASI DENGAN KOMUNITAS INFORMASI MASYARAKAT	PENGELOLAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK	PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	PENYUSUNAN KONTEN	MONITORING INFORMASI KEBIJAKAN, OPINI, DAN ASPIRASI PUBLIK
Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis kebutuhan	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Jumlah Konten Informasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah